

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kompetensi pemerintah desa, sistem keuangan desa, aksesibilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Berastagi. Dalam pengambilan hasil penelitian, dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner yang berisi pernyataan yang relevan terhadap variabel penelitian dan jumlah kuesioner yang disebarakan kepada aparat pemerintah desa sebanyak 54 kuesioner dan kuesioner yang kembali sebanyak 54. Berikut kesimpulan pengujian yang telah dilakukan selama penelitian:

1. Variabel Kompetensi Pemerintah Desa (X1) diperoleh hasil nilai signifikan sebesar 0.110. Nilai tersebut lebih besar dari nilai probabilitasnya yang sebesar 5%. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Kompetensi Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Berastagi.
2. Variabel Sistem Keuangan Desa (X2) diperoleh hasil nilai signifikan sebesar 0.001. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitasnya yang sebesar 5%. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Sistem Keuangan Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Berastagi.

3. Variabel Aksesibilitas Laporan Keuangan (X3) diperoleh hasil nilai signifikan sebesar 0.000. Nilai tersebut lebih kecil dari nilai probabilitasnya yang sebesar 5%. Dari hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Berastagi.

Penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, yang mana adalah menguji kembali penelitian terdahulu dengan subyek yang berbeda. Hasil penelitian ini menunjukkan terdapat variabel yang memberikan hasil yang sama dan terdapat variabel yang menunjukkan hasil yang berbeda. Kompetensi Pemerintah Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dan sejalan dengan hasil penelitian terdahulu. Sedangkan Sistem Keuangan Desa dan Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa dan sejalan dengan beberapa penelitian terdahulu. Hasil Uji F menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil daripada 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi linier dalam penelitian ini layak digunakan. Berdasarkan uji koefisien nilai *Adjusted R Square* sebesar 0.624 artinya bahwa variabel independen pada penelitian ini mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 62.4% sedangkan sisanya sebesar 37.6% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak termasuk dalam mode regresi.

Hasil pengujian ini membuktikan bahwa kompetensi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, kemungkinan ini terjadi di desa Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo dikarenakan terdapat

beberapa aparat pemerintah desa atau oknum yang menjawab bahwa kompetensi pemerintah desa tidak penting dalam pelaksanaannya. Pernyataan ini dibuktikan dari beberapa responden menjawab bahwa tidak pernah mengikuti pelatihan, sehingga tingkat kompetensi dari oknum dapat dikategorikan rendah. Dengan rendahnya kompetensi pemerintah desa memberi peluang bagi oknum lainnya yang lebih lihai dalam melakukan penyelewengan keuangan desa. Maka dari itu, perlu adanya peningkatan kompetensi dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan, sehingga dengan kompetensi yang tinggi kemungkinan dari penyelewengan keuangan desa dapat dipersempit hingga sulit terjadi. Kompetensi menjadi dasar dari segalanya, dengan begitu dapat mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, terkhususnya desa yang ada di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai penelitian yang telah dilakukan, terdapat keterbatasan yang dialami selama melakukan penelitian, yaitu:

1. Kesulitan dalam pengumpulan data kepada aparat pemerintah desa, karena banyak dari aparat pemerintah desa tidak biasa dalam melakukan pengisian kuesioner melalui *google form* sehingga penelitian harus dilakukan secara manual dan mengunjungi seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Berastagi.
2. Beberapa aparat pemerintah desa lalai dalam mengisi kuesioner, dimana waktu yang diberikan dalam pengisian kuesioner adalah selama 1

minggu dan terdapat aparat pemerintah desa yang lupa dalam melakukan pengisian, sehingga waktu yang dikeluarkan selama penelitian harus diperpanjang dan melakukan proses olah data harus diundur.

5.3. Implikasi

Terdapat implikasi untuk pemerintah desa terkait penelitian yang telah dilakukan, berikut implikasi yang diberikan pemerintah desa terkait selanjutnya:

1. Peneliti mengharapkan kepada desa-desa yang ada di Kecamatan Berastagi Kabupaten Karo, agar meningkatkan kompetensi aparat pemerintahnya, baik yang masuk secara struktural pemerintahan maupun tidak masuk struktural pemerintahan yang sah. Dengan meningkatkan kompetensi, pemerintah desa dapat memperoleh *insight* yang memadai dalam mengelola keuangan desa.
2. Peneliti mengharapkan kepada aparat pemerintah desa untuk menyediakan segala bentuk kebutuhan pendukung dalam meningkatkan sistem keuangan desa, sehingga aparat pemerintah desa dapat dengan mudah dalam menggunakan sistem keuangan desa.
3. Peneliti mengharapkan kepada aparat pemerintah desa terbuka terkait aksesibilitas laporan keuangan dan di tampilkan setiap bulannya sebagai bentuk pertanggung jawaban keuangan dan kinerja pemerintah kepada pemangku kepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Boyatzis, R. (1982). *The Competent Manager: A Model for Effective Performance*. New York: John Wiley and Sons.
- Chomariyah, A, B. (2016). *Keuangan Desa Pesisir*. Malang: Inteligencia Media.
- Dwipayana, A, S. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. Yogyakarta: Institute of Research and Empowerment.
- Elsinta, B. (2021). *Pengaruh Kompetensi SDM, Sistem Pengendalian Internal dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kecamatan Kurun Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah*. Yogyakarta: Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Febriana, D. (2021). *Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Pemerintah Desa, Transparansi, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Kantor Pemerintah Desa di Kecamatan petarukan Kabupaten Pemalang)*. Tegal: Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Universitas Pancasakti
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate*. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Hartono, J. (2016). *Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman- Pengalaman*. Yogyakarta: BPFE.
- Haryanto, S, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Edisi Pertama*. Semarang: Universitas Diponogoro.
- Hutapea, T. (2008). *Kompetensi Plus*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*.
- James, S. (2003). *Time Management*. Yogyakarta: Penerbit Kansius (Anggota IKAPI).
- Khalifa, M. (2021). *Pengaruh Sistem Keuangan Desa, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Dan Peran Perangkat Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Desa di Wilayah Kecamatan Batang Tuaka Kabupaten Indragiri Hilir)*. Riau : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Lamo, A. (2015). *Corporate Social Responsibility dalam Perspektif Governance*. Yogyakarta: CV. Budi Utama.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mega, K. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Pada Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. *Jurnal Riset Akuntansi*, 17(3), 180–161.
- Moeheriono. (2012.). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Natalio, B. (2021). *Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, Kepemimpinan, Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kecamatan – Kecamatan Kabupaten Kulon Progo*. Yogyakarta : Fakultas Bisnis dan Ekonomi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

- Nordiawan, D. (2010). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nugroho. (2008). *Administrasi Pemerintahan Desa Bagian 1: Tinjauan Umum*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- O'Brein, James A., (2005). *Pengantar Sistem Informasi*. Jakarta: Salemba 4
- O'Brien, J, A., & Marakas, G, M. (2011). *Management Information Systems Edition: 10th*. New York: McGraw-Hill.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
- Prasetyantoko, A. (2008). *Coporate Governance: Pendekatan Institusional*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Puspa, D. (2020). Pengaruh Kompetensi Pemerintah Desa, Sistem Pengendalian Internal, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 20(20), 281–298.
- Raba, M. (2006). *Akuntabilitas Konsep dan Implementasi*. Malang: UMMPress.
- Raharjo. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Rohman, A. (2018). *Pengelolaan Administrasi Keuangan Pemerintah Desa*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sari, E, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kabupaten Indagiri Hulu. *JOM Fekon*, 4(1), 571–586.
- Syahputra, I. (2019). *Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Aksesibilitas Laporan Keuangan, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Bengkalis*. Riau: Fakultas Ekonomi. Universitas Islam Riau
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah.
- Wijaya, D. (2018). *Akuntansi Desa*. Yogyakarta: Gava Media.
- Zhao Guoying. (2015). Forecast Competency Migration by a Methodology of Competency Analytics. *Open Journal of Social Sciences*, 3, 16–22.

DAFTAR REFRENSI

Siregar, Z. (2020). *Mark Up Anggaran, Kades dan Sekretaris Desa di Karo Divonis Penjara*. MEDANBISNISDAILY.

Tarigan, R. (2020). *Kepala BPKP Akui 80 % Kades Bermasalah Administrasi, Pemkab Karo Komit Transparansi*. PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KARI.

